

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tulisan yang memuat tentang gagasan pemikiran politik Kartosuwiryo tentang ideologi negara Islam sudah banyak membahas, namun satu sama lain memiliki fokus pembahasan yang berbeda-beda. Beberapa tulisan yang memuat tentang pemikiran politik Kartosuwiryo adalah :

Yang pertama, buku yang berjudul “*Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia SM. Kartosuwiryo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam.*” Karya Al-Chaidar yang diterbitkan oleh penerbit Darul Falah tahun 1999, memuat kerangka lengkap seputar pemikiran Kartosuwiryo. Buku ini memberikan penjelasan yang lebih focus pada pemikiran politik yang berkaitan dengan usahanya dalam mendirikan negara Islam Indonesia.

Kedua, buku karangan Holk. H. Dangel yang berjudul “*Darul Islam-NII dan Kartosuwiryo: Langkah Perwujudan Angan-Angan Yang Gagal*” diterbitkan oleh PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta pada tahun 2011. Argumen utama dalam buku ini bahwa Kartosuwiryo telah gagal mewujudkan cita-citanya dalam mendirikan negara Islam Indonesia. Holk H. Dangel menganggap bahwa pemikiran Kartosuwiryo dianggap tidak relevan dengan kondisi di Indonesia.

Ketiga, buku dengan judul *“Darul Islam Sebuah Pemberontak”* karangan Cornelis Van Djik yang diterbitkan Penerbit Grafiti. Buku ini fokus membahasa perjuangan Negara Islam Indonesia di wilayah bagian NII seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Karya tulisan ini memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian skripsi ini, yaitu Cornelis Van Djik menitikberatkan pada kehidupan Kartosuwiryo bersama NII yang banyak tentang proses penyebaran dan pemberontakkan diberbagai daerah

Keempat, skripsi yang berjudul *“Pemikiran S.M. Kartosuwiryo Tentang Negara Republik Indonesia”* yang ditulis oleh Akbarudin AM pada tahun 2013. Skripsi ini fokus membahas tentang alasan SM. Kartosuwiryo menolak konsep Negara Republik Indonesia. Dalam skripsi ini juga mencantumkan relevansi pandangan Kartosuwiryo dalam tiga hal, yaitu konsep negara, bentuk negara dan sistem pemerintahan di Indonesia.

Ke lima, skripsi yang berjudul *“Politik Hijrah Sekarmadji Marjjan Kartosuwiryo Tahun 1931-1962”* yang ditulis oleh Riyadi Suryana pada tahun 2015. Argumen utama dalam skripsi ini adalah bahwa politik hijrah Kartosuwiryo merupakan sebuah konsep dan perjuangan partai serta sebagai alat propaganda masyarakat untuk menggalang kekuatan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti kemudian berkesimpulan bahwa skripsi yang berjudul *(Ideologi Negara Islam dalam Kerangka Pemikiran Kartosuwiryo dan Relevansinya terhadap Gerakan-Gerakan Fundamental di Indonesia pasca Orde Baru)* ini

peneliti belum menemukan kajian yang sama dengan penelitian yang hendak dikaji karena posisi skripsi ini lebih melihat kepada relevansi pemikiran Kartosuwiryo terhadap peristiwa kontekstual saat ini. karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggali, menganalisa, membentuk pemahaman serta menuliskan hasil penelitian ini dengan menggunakan pendekatan ilmu politik. Pendekatan merupakan sebuah langkah yang ditempuh dalam mengiringi penelitian dengan harapan mampu membantu dalam merangkai penemuan yang terjadi guna menjadi sebuah informasi yang mampu menjadi ilmu dengan memenuhi syarat-syarat dari suatu hal mampu dianggap sebagai ilmu. Politik menjadi jalan dalam pendekatan ini, dikarenakan subjek maupun objek pembahasan dalam penelitian jelas termasuk pada kategori kajian politik

a. Hubungan Islam dan Negara

Dalam masalah hubungan Islam dan Negara banyak sekali yang berpendapat bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spritual, tanpa ada sangkut pautnya dengan masyarakat dan negara. Akibatnya, pemimpin dan aktivis Islam politik gagal menjadikan Islam sebagai dasar negara dan agama negara. Bahkan di Indonesia pada zaman rezim presiden Soekarno maupun presiden Soeharto memandang partai-partai politik yang berlandaskan Islam sebagai kekuatan-kekuatan pesaing potensial yang dapat merobohkan landasan negara

yang nasionalis. Dalam hal ini, cukuplah dikatakan bahwa saling curiga antara Islam dan Negara berlangsung di sebuah negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam.

Menurut Bahtiar Effendy dalam bukunya *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (2011: 6-7) salah satu cara untuk meletakkan subyek ini dalam perspektif komparatif dan historisnya adalah dengan memahami watak politik Islam. Masalah hubungan antara Islam dan negara sering kali muncul dari pandangan-pandangan tertentu yang di rumuskan dalam cara sedemikian rupa sehingga yang pertama secara konfrontatif dijabarkan dengan yang terakhir. Demikianlah tampaknya dipandang, bahwa keduanya tidak mungkin dibangun hubungan yang saling melengkapi. Karena itu, setidaknya pada awalnya, kandungan ideologis dan kerangka konstitusional jadi faktor-faktor amat penting dalam menentukan watak sebuah negara Islam. Jika memang demikianlah yang terjadi, maka sebuah tinjauan umum mengenai teoritisasi politik Islam bisa bermanfaat sebagai landasan untuk pemahaman yang lebih baik mengenai inti masalah ini.

Menurut Bahtiar Effendy (2011: 7) agama Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain, sebenarnya merupakan agama yang paling mudah untuk memahami premis semacam ini. Alasan utamanya terletak pada ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang “hadir dimana-mana”. Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa “di

mana-mana” kehadiran Islam selalu memberikan “panduan moral yang benar bagi tindakan manusia”.

Dalam relasi Islam dan Negara Bahtiar Effendi menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

a. Dekonfessionalisasi Islam

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh C.A.O Van Nieuwenhuijze yang ditulis dalam dua artikelnya pada akhir 1950-an dan pertengahan 1960-an. Pendekatan ini menjelaskan hubungan politik antara Islam dengan negara nasionalis modern Indonesia yang melihat bagaimana peran Islam dalam revolusi nasional dan pembangunan bangsa dalam kerangka teori Dekonfessionalisasi. Dalam pendekatan ini Nieuwenhuijze memandang peran Islam adalah sebagai instrumen dalam perlawanan melawan kolonial Belanda. (Effendi, 2011: 25)

b. Domestikasi Islam

Dalam pendekatan domestikasi Islam Bahtiar Effendi menggunakan teorinya Harry J. Benda mengenai Islam di Indonesia khususnya Islam di Jawa pada abad 16 hingga abad 18. Unsur terpenting dalam teori domestikasi Benda yaitu mengenai perkembangan perebutan kekuasaan antara Islam dan unsur-unsur non Islam dalam masyarakat Indonesia. Ini dicirikan pada pasca periode kolonial dengan terjadinya duplikasi wilayah pertempuran dimana perebutan kekuasaan yang berkembang kembali antara

kalangan muslim dan jawa dan dimenangkan oleh kalangan yang terakhir yaitu kalangan jawa atau non-Islam. Dengan begitu Islam telah berada dalam “cengkraman jawa”, di mana Islam mau tidak mau harus melakukan akomodasi dengan budaya jawa. (Effendi 2011: 31-33)

c. Kelompok Skismatik dan Aliran

Dalam pendekatan ini Bahtiar Effendi ingin mencoba mengelompokkan antara kelompok Islam dengan Jawa-isme, dimana yang pertama selalu berhasil dikalahkan. Teori ini diidentifikasi dengan tulisan tulisan Robert R. Jay dan Clifford Geertz. Robert R. Jay menekankan corak skematik hubungan Islam dan Jawaisme yang kemudian berkembang melampaui wilayah konfrontasi keagamaan dan memasuki bidang politik kebudayaan dan kehidupan sosial. Sedangkan Clifford Geertz mengembangkan skisme sosial keagamaan kedalam pengelompokan aliran sosio kultural dan politik. (Effendi, 2011: 34-35)

d. Perspektif Trikotomi

Dalam pendekatan ini Bahtiar effendy mengelompokkan antara beberapa persoalan, yaitu Islam ortodok (santri), Islam singkretis (aban), dan negara Islam (*power political*). Tiga persoalan ini yang kemudian melahirkan pendekatan trikotomi dalam politik Islam Indonesia yaitu fundamentalis, reformis, dan akomodasionis. (Effendy, 2011: 44)

Kelompok fundamentalisme mendukung jenis penafsiran Islam yang kaku dan murni, menentang pemikiran sekuler dan pengaruh barat, dan singkretisme kepercayaan tradisional, menekankan keutamaan agama atas politik. Sedangkan akomodasionis memberikan penghargaan yang tinggi kepada kerangka persatuan yang di berikan Islam, tetapi mereka berpegang kepada kepentingan-kepentingan sosial dan ekonomi harus mendapat prioritas utama oleh organisasi-organisasi Islam. (Effendy, 2011: 46)

e. Islam Kultural

Teori ini dikembangkan oleh Donal K. Emmerson, teori ini mencoba mengkaitkan kembali doktrinal yang formal antara Islam dan politik atau Islam dan negara. mmerson melihat sepanjang 1980-an, diskursus Islam di Indonesia yang tengah menegaskan dimensi Islam kultural, Emmerson memandang bahwa dimensinya sama sekali non politis, akibatnya penegasan kembali dimensi kultural di Indonesia benar-benar hidup dan berkembang dengan baik. (Effendy, 2011: 49-51)

Sebagai contoh Islam masa Orde Baru cenderung kesolehan religius dipandang kokoh dalam mempertahankan eksistensi Orba yang anti komunis. Dalam hal ini bobot Islam kultural lebih besar dan juga dapat mempengaruhi pemerintahan untuk menawarkan sejumlah konsesi kepada umat Islam. (Effendy, 2011: 51-52)

Jika dalam teori hubungan Islam dan negara Bahtiar Effendi menawarkan pendekatan-pendekatan untuk melihat hubungan antara Islam dan negara, maka dalam teori hubungan Islam dan negara Sukron Kamil menawarkan tipologi Islam dan negara. Tipologi-tipologi Islam dan negara menurut Sukron Kamil yaitu Teo-Demokrasi, Sekuler, dan Moderat. (Kamil, 2013: 21)

a. Teo-Demokrasi

Tipologi Teo-Demokrasi melihat bahwa Islam adalah agama sekaligus negara (*din wa daulah*). Pandangan ini menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan antara Islam dan negara merupakan dua entitas yang menyatu. Hubungan Islam dan negara benar-benar organik dimana negara berdasarkan syariah Islam dan ulama sebagai penasehat resmi eksekutif bahkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak hanya sebagai agama seperti pengertian Barat yang sekuler, tetapi suatu pola hidup yang lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan

Adapun tokoh Indonesia yang termasuk dalam tipologi ini adalah Muhammad Natsir dan Kartosuwiryo meskipun corak pemikiran Kartosuwiryo lebih kepada corak yang radikal. Kartosuwiryo menyatakan bahwa Islam adalah agama yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan termasuk praktek berpolitik dan bernegara. Demi mendirikan negara yang dicita-

citakannya Kartosuwiryo menggunakan istilah hijrah dan jihad sebagai perjuangan negara Islam yang melaksanakan syariat Islam secara kaffah.

b. Tipologi Sekuler

Menurut tipologi ini, Islam adalah agama yang tidak berbeda dengan agama lainnya dalam hal tidak mengajarkan cara-cara peraturan tentang kehidupan bermasyarakat. Karena itu persoalan negara adalah persoalan sekuler (duniawi) yang pertimbangannya adalah akal dan moralitas (kemaslahatan) kemanusiaan yang bersifat duniawi semata. Negara tidak harus diatur agama, demikian juga negara tidak boleh intervensi masalah agama karena agama dalam persoalan pribadi dan keluarga.

c. Tipologi Moderat

Tipologi ini menolak pendapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur semua urusan termasuk politik. Tetapi menolak juga pendapat kedua bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan politik. Kendati Islam tidak menunjukkan preferensi pada sistem politik tertentu, namun dalam Islam terdapat prinsip-prinsip moral dan etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dimana umat Islam bebas memilih sistem mana yang terbaik. (Kamil, 2013: 31)

2. Ideologi Negara Islam

Dalam konteks sejarah peradaban Islam, langkah Rosulullah SAW, adalah mempromosikan ajaran baru di Mekkah lalu membangun Negara Nubuawah atau Negara Islam menjadi agama internasional yang menyinari manusia (Elvandi, 2011: 27). Akan tetapi, dalam konteks sejarah politik Islam, sisi yang dipotret adalah langkah politik Rosulullah SAW untuk mendirikan Negara Islam di Madinah, lalu langkah *khulafaurasyidin* dalam mengembangkan sistem politik Islam, kemudian para penerusnya dalam membangun corak baru perpolitikan di daulahnya masing-masing. Inilah inti sudut pandang dalam sejarah politik Islam.

Dalam membela negara Rosulullah SAW menyadarkan umatnya dengan memberikan contoh bagaimana mempertahankan eksistensi ajaran Islam dalam menjawab tantangan dan serangan lawan. Sabar dan ulet dalam menghadapi perang lawan. Tidak diselesaikan secara sendirian, melainkan bersama para sahabat dan seluruh komunitas Islam dan dengan kemampuan ilmu karena Islam bukan untuk contoh membangun masyarakat *Marhamah* Madinah dan Makkah semata, melainkan untuk seluruh umat di alam raya dan sepanjang zaman (Suryanegara, 2009: 131). Diteladankan oleh Rosulullah SAW bahwa masyarakat Islam yang damai, selalu diancam perang oleh lawan yang anti Islam.

Negara terdiri atas unsur manusia, tanah, dan pemerintahan atau kekuatan politik. Sebagian ulama, seperti Muhammad Abdullah Al-Arabi merasa bahwa tiga hal tersebut tidak cukup untuk membangun sebuah Negara Islam, karena ketiganya baru merupakan unsur materi dan perlu ditambahkan unsur lain yang bersifat ruhi, yaitu prinsip Islam. Prinsip inilah yang membedakan antara Negara Islam dengan lainnya. (Elvandi, 2011: 27)

Madinah sebagai bentuk Negara Islam ketika itu, dengan Nabi Muhammad SAW sebagai komandan tertinggi kaum muslimin dan pemimpin mereka. Dengan menapak tilas semangat jihad Rosulullah SAW. Di Indonesia, Darul Islam didirikan ulang oleh SM. Kartosuwiryo dengan nama Negara Islam Indonesia (NII) yang memiliki kekuatan *asykariah* bernama Tentara Islam Indonesia (TII) atau Angkatan Perang Negara Islam Indonesia (APNII). Kartosuwiryo memproklamasikan NII pada tanggal 17 Agustus tahun 1949 di Tasikmalaya Jawa Barat. (Mufti, 2005: 174)

Ideologi Negara Islam lebih mengartikulasikan gagasan-gagasan Islam yang langsung di ambil dari sumber utama Islam, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ideologi Negara Islam terletak pada wataknya yang romantis. Negara Islam merupakan sebuah gerakan yang revolusioner yang berupaya menghidupkan kembali romantisme Islam zaman Rosulullah Muhammad SAW. Negara Islam merupakan sebuah simboli-sasi '*glorification of the past*'. (Chaidar, 1999: 17-18)

Ideologi Negara Islam juga sangat menentang terhadap sekularisme yang didefinisikan sebagai pemisahan tegas agama dari negara dan tidak punya hak terlibat dalam urusan negara (Assyaukarie, 2011: 22). Pemisahan sebagai perceraian agama dan politik tidak pernah dikenal dalam sejarah agama yang diperintah muslim. Sepanjang sejarah, agama selalu diintegrasikan dengan negara. Sekulerisme adalah gagasan yang sama sekali tidak terbayangkan dalam tradisi politik Islam, sebab wacana Islam Modern tentang Sekularisme sepenuhnya di ilhami oleh Wacana Barat. (Assyaukarie, 2011: 88)

Dalam pandangan Rasyid Ridho (Mufti, 2005: 176-177) bahwa Negara Islam jauh dari sistem kekuasaan menyeluruh yang mengatur setiap rincian kehidupan sosial, politik dan budaya kaum muslim. Menurutnya, orientasi ideologis yang luas dari Negara Islam adalah adanya pembaharuan tentang fundamentalisme, bukan merupakan langkah kembali pada keaslian Islam, hanya satu langkah kembali pada idealisme Islam awal yang ternodai oleh prasangka duniawi, etnis, dan sektarian. Urusan-urusan politik, sosial dan ekonomi negara diatur oleh undang-undang dasar yang prinsip umumnya diilhami oleh Al-Quran, sunnah, dan pengalaman Khulafau Rasyidin.

3. Seputar Fundamental

Istilah fundamentalisme berasal dari Protestan, yang menunjukkan suatu penafsiran riteral, namun kreatif terhadap Bibel. Makna yang sebenarnya istilah ini diasumsikan sebagai suatu sikap intelektual yang mengklaim telah mendasarkan prinsip-prinsip politiknya dari teks-teks suci (Satar, 2013: 1-2).

Musa Keilani, Sebagaimana dikutip oleh Satar Abdullah, mendefinisikan fundamentalisme sebagai gerakan sosial dan keagamaan yang mengajak umat Islam kembali kepada “prinsip” Islam yang fundamental, kembali kepada kemurnian etika dengan cara mengintegrasikan secara positif (dengan doktrin agama), kembali kepada kesemibangan hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan kepribadiannya sendiri.

Karakter fundamentalis, menurut Farid Esack sebagaimana yang dikutip oleh Satar Abdullah ada tujuh ciri; yaitu *pertama*, berkomitmen pada praktik keagamaan yang ketat; *kedua*, berkomitmen mentaati teks; *ketiga*, memiliki pandangan historis bahwa Islam mampu menjawab semua persoalan umat manusia secara permanen; *keempat*, berkeyakinan akan perlunya penerapan syari’at sebagai yang diyakini fundamentalis telah dipraktikan dalam era Nabi Muhammad SAW di Madinah; *kelima*, berkomitmen untuk menegakkan Negara Islam dengan kedaulatan di tangan Tuhan; *keenam* permusuhan terhadap semua yang menolak fundamentalis dengan menyebut mereka sebagai

orang yang telah memiliki kesesatan dari pada kebenaran; *ketujuh*, penyangkalan terhadap kebaikan apapun dalam sesuatu yang non-muslim.

Menurut Marty, sebagaimana yang dikutip oleh Satar Abdullah, ada beberapa prinsip yang dipegang teguh oleh kaum fundamentalis. *Pertama*, perlawanan (*oppositionalism*). Menurut Marty, fundamentalisme dalam agama apa pun mengambil bentuk perlawanan yang sering bersifat radikal terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agama, baik dalam bentuk modernisme, sekulerisme, maupun tata nilai Barat pada umumnya. Acuan dan tolak ukur sebuah ancaman tentu saja adalah kitab suci, yang dalam kasus fundamentalisme Islam adalah Al-Qur'an, dan pada batas-batas tertentu juga hadis Nabi Muhammad SAW.

Kedua, penolakan terhadap hermeneutika, dengan kata lain kaum fundamentalis menolak sikap kritis terhadap teks dan interpretasinya. Teks Al-Qur'an harus dipahami secara literal sebagaimana adanya karena nalar dipandang tidak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks.

Ketiga, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme. Bagi kaum fundamentalis, pluralitas merupakan hasil pemahaman yang keliru terhadap teks kitab suci.

Keempat, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis. Kaum fundamentalis berpandangan bahwa perkembangan

historis dan sosiologis telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin literal kitab suci. Perkembangan masyarakat dalam sejarah dipandang sebagai *as it should be*, bukan *as it is*. Dalam kerangka ini masyarakatlah yang harus menyesuaikan diri dengan teks kitab suci, dan bukan sebaliknya, teks atau tafsirannya yang mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, kaum fundamentalis bersifat a-historis dan bersifat a-sosiologis, dan bertujuan kembali pada bentuk masyarakat “ideal” seperti pada zaman Nabi dan kaum salaf, yang dipandang sebagai pengejawatahan atas kitab suci secara sempurna.

4. DI TII/NII

DI/TII atau Negara Islam Indonesia didirikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. TII berasal dari gabungan Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang diubah menjadi gerakan militer baru yang dikenal dengan sebutan Tentara Islam Indonesia (TII). Sedangkan terbentuknya gerakan Negara Islam Indonesia atau Darul Islam yaitu ketika adanya perjanjian Renville di Jawa Tengah. (Mufti, 2005: 176-177)

Ada berbagai penafsiran yang berbeda tentang arti singkatan dari kependekan DI. Salah satu diantaranya tentulah DI yang berarti *Darul Islam* atau wilayah Islam. Tetapi menurut pendapat Alers (Djik, terj., Grafiti Pers, 1983: 79) Pada mulanya DI adalah *Daerah Satu*, yang ditafsirkannya sebagai “negara kesatuan” dengan mengatakan arti yang sebenarnya adalah *dar al Islam*. Sedangkan menurut pinardi (Djik, terj.,

Grafiti Pers, 1983: 79) ialah “daerah kesatuan” artinya “daerah kesatu” yaitu daerah induk Islam, yang akan menjadi daerah yang di dalamnya hukum Islam dan kekuasaan Islam sepenuhnya terlaksana.

Ketika terjadinya Perjanjian Renville yang mengharuskan Pemerintahan RI hijrah dari Jawa Barat ke Yogyakarta, di sini Kartosuwiryo mempunyai peluang besar untuk mendirikan NII dan menganggap bahwa ini bukan sebagai penyimpangan mendirikan NII (Djik, terj., Grafiti Pers 1983: 178). Karena setelah adanya Perjanjian Renville wilayah RI hanya tinggal Yogyakarta, sementara Negara Islam Indonesia berada di Jawa Barat dan mengalami pemekaran wilayah yaitu Daerah Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh yang mendukung berdirinya Negara Islam Indonesia. (Awwas, 2008: 35)

Jangka waktu hingga seluruh Indonesia menjadi sebuah Negara Islam oleh Kartosuwiryo dibagi menjadi 4 fase. Pecahnya revolusi Islam pada bulan Februari 1948, disebut sebagai fase pertama, saat proklamasi Negara Islam Indonesia adalah fase kedua. Fase ketiga tiba dengan pecahnya perang dunia ketiga dan revolusi dunia sebagai akibat perang itu.

TII lahir setahun sebelum Proklamasi NII dikumandangkan. Kedudukan TII sebagai pengawal NII (Mufti, 2005: 175). Dalam Maklumat Komandemen Tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia (MKT-APNII) No.11 dijelaskan bahwa:

1. TII merupakan tentara Allah yang disebut *Jundullah* mempunyai tugas menerima serta bertanggungjawab terhadap penuaian tugas *Illahi* secara mutlak, dan merealisasikan, menggalang kerajaan Allah yaitu Negara Islam Indonesia.
2. Merupakan tentara ideologi Islam, oleh karena itu mereka harus meyakini ajaran Islam dan keadilan hukum Allah yang mewajibkan membela NII.
3. Tentara rakyat yang membela rakyat dan melepaskan dari ketertindasan yang dilakukan oleh penguasaan *Jahiliyyah* (Penguasa RI) yang telah menjelma menjadi Republik Komunis. (Mufti, 2005: 175)

Pada tanggal 25 Januari 1949, terjadi peristiwa yang dicatat sebagai belangsung lebih awal dari pertikaian yang berlangsung lebih dari 13 tahun antara pasukan pemerintah dengan gerakan Darul Islam (Dengel, 1995: 86). Pertikaian ini terbilang cukup lama dan membutuhkan waktu yang cukup lama pula untuk pemerintah membubarkan gerakan Darul Islam ini.

Menurut Mufti (2005: 179) faktor-faktor kekuatan Darul Islam di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Keuletan pemberontak DI yang mendapat dukungan Hizbullah (Tentara Allah) didirikan pada masa akhir penjajahan Jepang.
2. Adanya dukungan dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).
3. Darul Islam memiliki sayap bersenjata yang disebut Sabilillah.

4. Sifat dari Darul Islam ialah *ofensif* yang berarti menyerang dan mendapatkan rampasan dari tentara untuk memperluas wilayahnya dan bertahan hidup.
5. Memiliki struktur kekuasaan yang tertera.

Panglima divisi Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Kamran yang ditempatkan di belakang garis demarkasi van Mook. Selain menjadi panglima divisi TII Kamran juga menjadi anggota Madjlis Islam di bawah perintah Imam yaitu Kartosuwiryo. (Dengel, 1995: 62)

5. Pemaknaan Ideologi atas Islam

Istilah ideologi berasal dari kata “idea” yang berarti pemikiran, daya khayal, konsep atau keyakinan. Kemudian “logos” berarti logika atau ilmu. Dengan demikian ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang keyakinan dan gagasan. Seorang ideologi adalah penganjur gagasan tertentu yang perlu ditaati oleh suatu kelompok, kelas sosial, bangsa atau ras tertentu. Ideologi berbeda dengan bentuk-bentuk pemikiran lain, seperti halnya ilmu pengetahuan dan filsafat. Ideologilah yang mampu merubah masyarakat, sementara ilmu dan filsafat tidak, karena sifat dan keharusan ideologi meliputi keyakinan tanggung jawab dan keterlibatan untuk komitmen. (Syariati, 1993: 5)

Dalam bentuknya yang masih asli, pada dasarnya agama dalam hal ini Islam dapat di fungsionalkan sebagai kekuatan revolusioner untuk membebaskan masyarakat di negeri manapun yang tertindas baik secara kultural maupun politik. Lebih tegas lagi, Islam dalam bentuk murninya

belum terkontaminasi oleh nilai-nilai diluar dirinya merupakan ideologi revolusioner kearah pembebasan dari hegemoni politik, ekonomi dan kultural yang bukan Islam. (Syariat, 1993: 5)

Islam sebagai sebuah ideologi, bukanlah spesialis ilmiah, melainkan perasaan yang dimiliki seorang berkenaan dengan mazhab pemikiran sebagai suatu system keyakinan dan bukan sebagai suatu system kebudayaan. Hal ini berarti Islam perlu dipahami sebagai sebuah ide dan bukan sebagai sekumpulan ilmu. Islam perlu dipahami sebagai suatu gerakan kemanusiaan, historis dan intelektual, bukan sebagai gudang informasi teknis dan ilmiah. Dengan demikian Islam perlu dipandang sebagai ideologi dalam pikiran seorang intelektual, bukan sebagai ilmu-ilmu agama kuno dalam pikiran seorang ahli agama. (Syariat, 1993: 6)

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian yang berjudul “Ideologi Negara Islam di Indonesia dalam Kerangka Pemikiran Kartosuwiryo dan Relevansinya terhadap gerakan-gerakan fundamentalis di Indonesia Pasca Orde Baru” muncul karena peneliti menemukan permasalahan bahwa pada peristiwa saat ini banyaknya bermunculan gerakan-gerakan Islam fundamentalis di Indonesia yang menginginkan tegaknya Syariat Islam. Kelompok Islam fundamental ini berjuang untuk menegakkan syariat Islam tidak hanya dengan jalur pendekatan politik, tetapi juga dengan perjuangan

bersenjata sebagaimana yang dilakukan oleh DI/TII yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo.

Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal umat Islam Indonesia yang terpengaruh dengan gaya hidup sekuler masyarakat Barat sehingga memunculkan perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Tidak hanya itu, kelompok ini juga muncul karena lemahnya peran negara dalam usaha penegakan hukum.

Dengan adanya peristiwa ini peneliti melihat bahwa sejarah fundamentalisme Islam dimasa lalu muncul kembali yang pada saat itu pemikiran fundamentalisme Islam ini ditonjolkan oleh seorang tokoh Islam Indonesia yaitu Sekarmadji Marijan Kartosuwiryo. Maka dengan itu, disini penulis akan meneliti lebih dalam pemikiran Kartosuwiryo tentang ideologi negara dan melihat relevansinya terhadap peristiwa kontekstual pada saat ini dengan pendekatan historis dan pendekatan biografi.

Kerangka Pemikiran

